

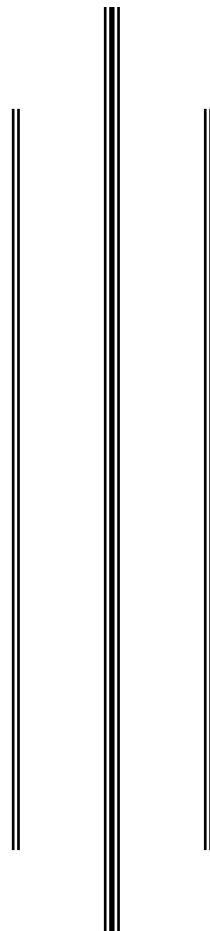


ꦒꦸꦏꦸꦁꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦤꦭꦶ

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"

MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2592 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dan Penghentian Sementara Pelaksanaan Belanja Daerah terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional diantaranya Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) agar segera mencermati seluruh program dan kegiatan di instansi masing-masing, dan segera menghentikan pelaksanaan belanja daerah secara keseluruhan kecuali untuk belanja-belanja yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas, untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif; penghentian proses pengadaan barang/jasa dengan memperhitungkan realisasi keuangan masing-masing kegiatan, selanjutnya dituangkan dalam daftar rasionalisasi kegiatan masing-masing dan dilaporkan kepada Bappeda Provinsi Bali dan BPKAD Provinsi Bali.

Kritik dan saran untuk kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat kami harapkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, semoga menjadi landasan operasional dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2020.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Bab I Pendahuluan..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 3

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan 7

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 9

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 10

Bab IV Penutup 10

Lampiran

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun Anggaran 2020
- Tabel 3.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD akan menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2592 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dan Penghentian Sementara Pelaksanaan Belanja Daerah terkait penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional diantaranya Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) agar segera mencermati seluruh program dan kegiatan di instansi masing-masing, dan segera menghentikan pelaksanaan belanja daerah secara keseluruhan kecuali untuk belanja-belanja yang bersifat wajib dan/atau kegiatan strategis prioritas, untuk kepentingan umum dan hal-hal mendesak lainnya secara selektif; penghentian proses pengadaan barang/jasa dengan memperhitungkan realisasi keuangan masing-masing kegiatan, selanjutnya dituangkan dalam daftar rasionalisasi kegiatan masing-masing dan dilaporkan kepada Bappeda Provinsi Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- 23) Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Provinsi Bali;
- 24) Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 25) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2592 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Target Pendapatan Daerah dan Penghentian Sementara Pelaksanaan Belanja Daerah.
- 26) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2234 Tahun

2020 tentang Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

- 27) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3091 Tahun 2020 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dengan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 adalah :

- 1) Penyesuaian target, capaian kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
- 2) Merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada sisa triwulan tahun 2020 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik.

1.1. Latar Belakang

mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

memuat evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 yang meliputi capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2020, kendala yang dihadapi dan solusi yang akan ditempuh.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Evaluasi pada dasarnya adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya. Jadi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 secara prinsip merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun untuk tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2020. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Bali. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target fisik kegiatan, penyerapan dana, kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan beberapa bagian dari Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja sampai triwulan I Tahun 2020 secara keseluruhan realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mencapai kinerja 7,57 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp 680.614.407,00 (Enam ratus delapan puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus tujuh rupiah) atau mencapai 6,13 persen. Salah satu faktor penghambat di dalam pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan antara lain terdapatnya rasionalisasi anggaran untuk penguatan belanja tidak terduga yang menyebabkan menurunnya alokasi belanja langsung yang sangat signifikan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, berikut langkah-langkah yang diperlukan pada triwulan-triwulan berikutnya, antara lain seperti :

1. Memperkuat sinergitas antar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan dinas terkait lingkup Pemerintah Provinsi Bali dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.
2. Mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya untuk tetap dapat mencapai target kinerja semaksimalnya dengan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya rekapitulasi capaian realisasi kinerja dan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1. (terlampir).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 yang dituangkan dalam Bab III ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 3.1. (terlampir).

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2020. Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 adalah penyesuaian target, capaian kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2020 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 sangat terbatas, hanya pada sisa triwulan tahun 2020, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan semester 1 sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Tabel 2.1
CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)		BOBOT KINERJA PER TAHUN (%)	REALISASI PER TRIWULAN						KENDALA	SOLUSI
		INDUK	PERUBAHAN		TW I			TW II				
					JUMLAH	% KEUANGAN	% KINERJA	JUMLAH	% KEUANGAN	% KINERJA		
2.	URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR	19.139.144.742	7.212.402.292	100%	764.625.592	4,00	4,93					
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.139.144.742	7.212.402.292	100%	764.625.592	4,00	4,93					
2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.139.144.742	7.212.402.292	100%	764.625.592	4,00	4,93					
2.11.01.01.	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.103.545.632	3.098.579.673	100%	680.614.407	6,13	7,57					
2.11.2.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	8.701.573.527	2.033.808.230	100%	482.931.823	5,55	5,85					
2.11.2.11.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.509.000	630.000	100%	630.000	41,75	41,75					
2.11.2.11.01.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.200.000	181.531.179	100%	29.419.560	10,85	15,84					
2.11.2.11.01.01.01.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	61.770.925	-	100%	-	-	-					
2.11.2.11.01.01.01.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.500.000	1.144.825	100%	250.000	1,28	5,87					
2.11.2.11.01.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.312.450	6.828.600	100%	6.828.600	51,29	51,29					
2.11.2.11.01.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.860.000	21.860.000	100%	5.310.000	16,67	25,00					
2.11.2.11.01.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.337.500	5.450.000	100%	900.000	5,51	5,51					
2.11.2.11.01.01.01.09.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	244.750.000	2.400.000	100%	-	-	-					
2.11.2.11.01.01.01.10.	Upacara Keagamaan	92.659.944	92.659.944	100%	7.650.000	8,26	12,47					
2.11.2.11.01.01.01.13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	911.245.226	540.284.888	100%	90.061.712	9,88	9,88					
2.11.2.11.01.01.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	750.204.806	540.567.888	100%	103.745.712	13,83	13,83					
2.11.2.11.01.01.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	603.741.324	541.452.447	100%	212.185.948	35,15	35,15					
2.11.2.11.01.01.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	40.250.000	5.490.000	100%	-	-	-					
2.11.2.11.01.01.01.23.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	5.482.477.268	-	100%	-	-	-					
2.11.2.11.01.01.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	119.948.284	93.508.459	100%	25.950.291	21,63	25,93					
2.11.2.11.01.01.01.25.	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi	40.806.800	-	100%	-	-	-					
2.11.2.11.01.01.02.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	567.380.944	304.811.271	100%	58.295.856	10,27	14,38					
2.11.2.11.01.01.02.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi	246.758.960	211.134.860	100%	41.647.040	16,88	22,09					
2.11.2.11.01.01.02.02.	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	176.151.992	48.963.492	100%	6.079.408	3,45	7,70					
2.11.2.11.01.01.02.03.	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	144.469.992	44.712.919	100%	10.569.408	7,32	9,35					
2.11.2.11.01.01.03.	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	50.086.000	5.944.900	100%	-	-	11,87					
2.11.2.11.01.01.03.01.	Pengembangan Koperasi Subak	50.086.000	5.944.900	100%	-	-	11,87					
2.11.2.11.01.01.04.	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	569.153.976	200.429.526	100%	27.312.274	4,80	17,35					
2.11.2.11.01.01.04.01.	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	190.413.992	69.835.292	100%	8.291.508	4,35	20,27					
2.11.2.11.01.01.04.02.	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	182.339.492	50.204.542	100%	10.952.858	6,01	6,01					
2.11.2.11.01.01.04.03.	Penilaian Kesehatan Koperasi	196.400.492	80.389.692	100%	8.067.908	4,11	25,04					
2.11.2.11.01.01.05.	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	375.340.376	144.463.376	100%	25.515.374	6,80	13,55					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)		BOBOT KINERJA PER TAHUN (%)	REALISASI PER TRIWULAN						KENDALA	SOLUSI
		INDUK	PERUBAHAN		TW I			TW II				
					JUMLAH	% KEUANGAN	% KINERJA	JUMLAH	% KEUANGAN	% KINERJA		
2.11.2.11.01.01.05.01.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	85.247.492	47.639.442	100%	7.931.883	9,30	19,28					
2.11.2.11.01.01.05.02.	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	130.586.892	56.470.692	100%	11.455.708	8,77	19,35					
2.11.2.11.01.01.05.04.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	159.505.992	40.353.242	100%	6.127.783	3,84	5,74					
2.11.2.11.01.01.06.	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	70.670.000	6.826.500	100%	4.316.700	6,11	6,26					
2.11.2.11.01.01.06.01.	Pemberdayaan Koperasi Tenun	70.670.000	6.826.500	100%	4.316.700	6,11	6,26					
2.11.2.11.01.01.07.	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	769.340.809	402.295.870	100%	82.242.380	10,69	11,73					
2.11.2.11.01.01.07.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	382.574.702	306.273.586	100%	54.635.264	14,28	14,81					
2.11.2.11.01.01.07.02.	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	302.496.992	58.729.292	100%	21.527.708	7,12	9,10					
2.11.2.11.01.01.07.04.	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	84.269.115	37.292.992	100%	6.079.408	7,21	7,23					
2.11.01.02.	- UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.035.599.110	4.113.822.619	100%	84.011.185	1,05	1,97					
2.11.2.11.01.02.08.	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	8.035.599.110	4.113.822.619	100%	84.011.185	1,05	1,97					
2.11.2.11.01.02.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	829.000	822.000	100%	822.000	99,16	99,16					
2.11.2.11.01.02.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000	21.578.900	100%	2.341.413	7,32	11,81					
2.11.2.11.01.02.08.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.000.000	3.443.000	100%	3.443.000	86,08	86,08					
2.11.2.11.01.02.08.04.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	499.950	100%	499.950	25,00	25,00					
2.11.2.11.01.02.08.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.027.000	1.076.600	100%	-	-	53,11					
2.11.2.11.01.02.08.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	840.000	840.000	100%	140.000	16,67	25,00					
2.11.2.11.01.02.08.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.625.000	525.000	100%	525.000	20,00	20,00					
2.11.2.11.01.02.08.08.	Upacara Keagamaan	18.000.000	18.000.000	100%	2.025.000	11,25	15,83					
2.11.2.11.01.02.08.09.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	226.296.740	226.200.152	100%	38.990.648	17,23	17,23					
2.11.2.11.01.02.08.10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	69.637.123	65.552.123	100%	16.321.408	23,44	29,48					
2.11.2.11.01.02.08.11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.525.000	3.740.000	100%	3.740.000	49,70	49,70					
2.11.2.11.01.02.08.12.	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	4.275.000	3.003.950	100%	3.003.950	70,27	70,27					
2.11.2.11.01.02.08.13.	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	148.488.247	88.728.684	100%	12.158.816	8,19	15,09					
2.11.2.11.01.02.08.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3.617.056.000	79.812.260	100%	-	-	-					
2.11.2.11.01.02.08.15.	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.900.000.000	3.600.000.000	100%	-	-	-					
	Total	2.798.473.047.387	1.859.775.388.374	100%	764.625.592	4,00	4,93					

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR						11.103.545.632,00	3.587.179.137,00	(-7.516.366.495,00)	7.800.553.108,00
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						11.103.545.632,00	3.587.179.137,00	(-7.516.366.495,00)	7.800.553.108,00
2.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						19.139.144.742,00	7.212.402.292,00	(-11.926.742.450,00)	7.800.553.108,00
2.11.01.01.	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						11.103.545.632,00	3.098.579.673,00	(-8.004.965.959,00)	5.892.065.245,00
2.11.2.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				8.701.573.527,00	2.033.808.230,00	(-6.667.765.297,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah materai yang disediakan Ouput Perubahan : Jumlah materai yang disediakan Outcome : Persentase administrasi perkantoran	82.50 1.509.000,00 245 lembar 100%	Denpasar	8.701.573.527,00 1.509.000,00	2.033.808.230,00 630.000,00	(-6.667.765.297,00) (-879.000,00)	0 0
2.11.2.11.01.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik Ouput Perubahan : Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik Outcome : Persentase operasional kantor	271.200.000,00 3 jenis 100%		271.200.000,00	181.531.179,00	(-89.668.821,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.04.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis alat tulis kantor Ouput Perubahan : Jumlah jenis alat tulis kantor Outcome : Persentase administrasi perkantoran	61.770.925,00 39 jenis 100%		61.770.925,00	0	(-61.770.925,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan Ouput Perubahan : Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran	19.500.000,00 3 jenis 100%		19.500.000,00	1.144.825,00	(-18.355.175,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.06.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis instalasi listrik Ouput Perubahan : Jumlah jenis instalasi listrik Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	13.312.450,00 8 jenis 50%		13.312.450,00	6.828.600,00	(-6.483.850,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis bahan bacaan Ouput Perubahan : Jumlah jenis bahan bacaan Outcome : Persentase perolehan informasi	31.860.000,00 7 jenis 100%		31.860.000,00	21.860.000,00	(-10.000.000,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis makanan dan minuman Ouput Perubahan : Jumlah jenis makanan dan minuman Outcome : Persentase makanan dan minuman yang tersedia	16.337.500,00 1 jenis 50%		16.337.500,00	5.450.000,00	(-10.887.500,00)	0
2.11.2.11.01.01.01.09.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke			Input : Tersedianya Dana	244.750.000,00		244.750.000,00	2.400.000,00	(-242.350.000,00)	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dalam dan Luar Daerah			Output Induk : Jumlah jenis perjalanan dinas	2 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis perjalanan dinas						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	100%					
2.11.2.11.01.01.01.10.	Upacara Keagamaan			Input : Tersedianya Dana			92.659.944,00	92.659.944,00	0	0
				Output Induk : Jumlah jenis upacara keagamaan	6 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis upacara keagamaan						
				Outcome : Persentase upacara agama yang dilaksanakan	100%					
2.11.2.11.01.01.01.13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			911.245.226,00	540.284.888,00	(-370.960.338,00)	0
				Output Induk : Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	6 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	43%					
2.11.2.11.01.01.01.16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			750.204.806,00	540.567.888,00	(-209.636.918,00)	0
				Output Induk : Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor						
				Outcome : Persentase kenyamanan gedung kantor	25%					
2.11.2.11.01.01.01.17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Input : Tersedianya Dana			603.741.324,00	541.452.447,00	(-62.288.877,00)	0
				Output Induk : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 roda 4 / 8 roda 2					
				Ouput Perubahan : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	100%					
2.11.2.11.01.01.01.20.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			40.250.000,00	5.490.000,00	(-34.760.000,00)	0
				Output Induk : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor						
				Outcome : Persentase kelancaran administrasi kantor	100%					
2.11.2.11.01.01.01.23.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			5.482.477.268,00	0	(-5.482.477.268,00)	0
				Output Induk : Jumlah gedung kantor yang direhab	0					
				Ouput Perubahan : Jumlah gedung kantor yang direhab						
				Outcome : Meningkatnya kenyamanan operasional kantor	0					
2.11.2.11.01.01.01.24.	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja			Input : Tersedianya Dana			119.948.284,00	93.508.459,00	(-26.439.825,00)	0
				Output Induk : Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen					
				Ouput Perubahan : Jumlah dokumen perencanaan						
				Outcome : Pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan capaian kinerja	2 dokumen					
2.11.2.11.01.01.01.25.	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi			Input : Tersedianya Dana			40.806.800,00	0	(-40.806.800,00)	0
				Output Induk : Laporan hasil monev program/kegiatan Koperasi dan UKM	0					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ouput Perubahan : Laporan hasil money program/kegiatan Koperasi dan UKM Outcome : Evaluasi program/kegiatan Koperasi dan UKM	0					
2.11.2.11.01.01.02.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				567.380.944,00	304.811.271,00	(-262.569.673,00)	1.860.600.000,00
				Jumlah koperasi yang bankable	58	9 kabupaten/kota	567.380.944,00	304.811.271,00	(-262.569.673,00)	1.860.600.000,00
2.11.2.11.01.01.02.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas Ouput Perubahan : Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas Outcome : Peningkatan jumlah kelompok usaha bersama pra koperasi yang membentuk koperasi	32 orang 19 koperasi		246.758.960,00	211.134.860,00	(-35.624.100,00)	660.600.000,00
2.11.2.11.01.01.02.02.	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai Ouput Perubahan : Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai Outcome : Peningkatan jumlah koperasi yang berkinerja dengan baik	15 koperasi 15 koperasi		176.151.992,00	48.963.492,00	(-127.188.500,00)	540.000.000,00
2.11.2.11.01.01.02.03.	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan Ouput Perubahan : Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan Outcome : Database koperasi terupdate	30 koperasi 1 database		144.469.992,00	44.712.919,00	(-99.757.073,00)	660.000.000,00
2.11.2.11.01.01.03.	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				50.086.000,00	5.944.900,00	(-44.141.100,00)	500.000.000,00
				Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	Provinsi Bali	50.086.000,00	5.944.900,00	(-44.141.100,00)	500.000.000,00
2.11.2.11.01.01.03.01.	Pengembangan Koperasi Subak			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian Ouput Perubahan : Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian Outcome : Terbentuknya koperasi subak yang aktif	3 subak 3 koperasi		50.086.000,00	5.944.900,00	(-44.141.100,00)	500.000.000,00
2.11.2.11.01.01.04.	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				569.153.976,00	200.429.526,00	(-368.724.450,00)	426.208.718,00
				Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	118	9 kabupaten/kota	569.153.976,00	200.429.526,00	(-368.724.450,00)	426.208.718,00
2.11.2.11.01.01.04.01.	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi Ouput Perubahan : Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi Outcome : Meningkatnya koperasi yang melaksanakan peraturan perkoperasian	26 Koperasi 26 Koperasi		190.413.992,00	69.835.292,00	(-120.578.700,00)	130.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.01.04.02.	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya Ouput Perubahan : Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya Outcome : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	8 Koperasi		182.339.492,00	50.204.542,00	(-132.134.950,00)	120.000.000,00
2.11.2.11.01.01.04.03.	Penilaian Kesehatan Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya Ouput Perubahan : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berprestasi	8 Koperasi 100 KSP/USP Koperasi 100 KSP/USP Koperasi		196.400.492,00	80.389.692,00	(-116.010.800,00)	176.208.718,00
2.11.2.11.01.01.05.	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				375.340.376,00	144.463.376,00	(-230.877.000,00)	525.256.527,00
				Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	104	9 kabupaten/kot a	375.340.376,00	144.463.376,00	(-230.877.000,00)	525.256.527,00
2.11.2.11.01.01.05.01.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan Ouput Perubahan : Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	0 0 0		85.247.492,00	47.639.442,00	(-37.608.050,00)	130.000.000,00
2.11.2.11.01.01.05.02.	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan Ouput Perubahan : Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang memperoleh permodalan	50 Koperasi 50 Koperasi		130.586.892,00	56.470.692,00	(-74.116.200,00)	130.000.000,00
2.11.2.11.01.01.05.04.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal Ouput Perubahan : Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal Outcome : Meningkatnya jumlah produk unggulan koperasi	0 0 0		159.505.992,00	40.353.242,00	(-119.152.750,00)	265.256.527,00
2.11.2.11.01.01.06.	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				70.670.000,00	6.826.500,00	(-63.843.500,00)	800.000.000,00
				Jumlah koperasi tenun yang aktif	1	9 kabupaten/kot a	70.670.000,00	6.826.500,00	(-63.843.500,00)	800.000.000,00
2.11.2.11.01.01.06.01.	Pemberdayaan Koperasi Tenun			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah peserta yang bimtek tenun Ouput Perubahan : Jumlah peserta yang bimtek tenun Outcome : Meningkatnya koperasi tenun yang aktif	1 Koperasi		70.670.000,00	6.826.500,00	(-63.843.500,00)	800.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.01.07.	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				769.340.809,00	402.295.870,00	(-367.044.939,00)	1.780.000.000,00
				Jumlah UMKM yang bankable	180	9 kabupaten/kot a	769.340.809,00	402.295.870,00	(-367.044.939,00)	1.780.000.000,00
2.11.2.11.01.01.07.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha Ouput Perubahan : Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable			382.574.702,00	306.273.586,00	(-76.301.116,00)	286.000.000,00
2.11.2.11.01.01.07.02.	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama Ouput Perubahan : Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	50 UMKM		302.496.992,00	58.729.292,00	(-243.767.700,00)	1.252.000.000,00
2.11.2.11.01.01.07.04.	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha Ouput Perubahan : Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	25 UMKM		84.269.115,00	37.292.992,00	(-46.976.123,00)	242.000.000,00
2.11.01.02.	- UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah						8.035.599.110,00	4.113.822.619,00	(-3.921.776.491,00)	708.487.863,00
2.11.2.11.01.02.08.	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Pangan, Sandang dan Papan	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali				8.035.599.110,00	4.113.822.619,00	(-3.921.776.491,00)	708.487.863,00
				Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	50 Orang	Denpasar	8.035.599.110,00	4.113.822.619,00	(-3.921.776.491,00)	708.487.863,00
2.11.2.11.01.02.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah materai Ouput Perubahan : Jumlah materai Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran	80 lembar		829.000,00	822.000,00	(-7.000,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis jasa komunikasi air dan listrik Ouput Perubahan : Jumlah jenis jasa komunikasi air dan listrik Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	3 jenis		32.000.000,00	21.578.900,00	(-10.421.100,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah jenis ATK Ouput Perubahan : Jumlah jenis ATK Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran	21 jenis		4.000.000,00	3.443.000,00	(-557.000,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.04.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Input : Tersedianya Dana Output Induk : Jumlah lembar foto copy Ouput Perubahan : Jumlah lembar foto copy Outcome : Persentase kelancaran administrasi perkantoran	2222 lembar		2.000.000,00	499.950,00	(-1.500.050,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.05.	Penyediaan Komponen Instalasi			Input : Tersedianya Dana			2.027.000,00	1.076.600,00	(-950.400,00)	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11.2.11.01.02.08.06.	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Output Induk : Jumlah jenis instalasi listrik	12 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis instalasi listrik						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional perkantoran	100%					
				Input : Tersedianya Dana			840.000,00	840.000,00	0	0
2.11.2.11.01.02.08.07.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Output Induk : Jumlah jenis bahan bacaan	1 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis bahan bacaan						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	100%					
				Input : Tersedianya Dana			2.625.000,00	525.000,00	(-2.100.000,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.08.	Penyediaan Makanan dan Minuman			Output Induk : Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis makanan dan minuman						
				Outcome : Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100%					
				Input : Tersedianya Dana			18.000.000,00	18.000.000,00	0	0
2.11.2.11.01.02.08.09.	Upacara Keagamaan			Output Induk : Jumlah jenis upacara keagamaan	5 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis upacara keagamaan						
				Outcome : Persentase upacara agama yang dilaksanakan	100%					
				Input : Tersedianya Dana			226.296.740,00	226.200.152,00	(-96.588,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Output Induk : Jumlah jenis jasa pemeliharaan gedung kantor dan jasa keamanan	3 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis jasa pemeliharaan gedung kantor dan jasa keamanan						
				Outcome : Persentase kenyamanan kantor	100%					
				Input : Tersedianya Dana			69.637.123,00	65.552.123,00	(-4.085.000,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Output Induk : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	100%					
				Input : Tersedianya Dana			7.525.000,00	3.740.000,00	(-3.785.000,00)	0
2.11.2.11.01.02.08.12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Output Induk : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 jenis					
				Ouput Perubahan : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara						
				Outcome : Persentase kelancaran operasional kantor	100%					
				Input : Tersedianya Dana			4.275.000,00	3.003.950,00	(-1.271.050,00)	16.500.000,00
2.11.2.11.01.02.08.13.	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM			Output Induk : Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 dokumen					
				Ouput Perubahan : Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM						
				Outcome : Data laporan program tahun 2020	1 dokumen					
				Input : Tersedianya Dana			148.488.247,00	88.728.684,00	(-59.759.563,00)	691.987.863,00
2.11.2.11.01.02.08.13.	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM			Output Induk : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	25 KUKM					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF (RKPD PERUBAHAN)			PRAKIRAAN MAJU
							INDUK	PERUBAHAN	MENINGKAT / MENURUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ouput Perubahan : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM						
				Outcome : Persentase peserta diklat yang mendapat nilai minimal (C)	100%					
2.11.2.11.01.02.08.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Input : Tersedianya Dana			3.617.056.000,00	79.812.260,00	(-3.537.243.740,00)	0
				Output Induk : Jumlah gedung kantor yang direhab	0					
				Ouput Perubahan : Jumlah gedung kantor yang direhab						
				Outcome : Persentase kenyamanan operasional kantor	0					
2.11.2.11.01.02.08.15.	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM			Input : Tersedianya Dana			3.900.000.000,00	3.600.000.000,00	(-300.000.000,00)	0
				Output Induk : Jumlah pengurus dan pengelola KUKM yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	1091					
				Ouput Perubahan : Jumlah pengurus dan pengelola KUKM yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya						
				Outcome : Meningkatnya kapasitas pengurus dan pengelola KUKM	1091					
	TOTAL						11.103.545.632,00	3.587.179.137,00	(-7.516.366.495,00)	7.800.553.108,00